# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

Pembangunan adalah istilah yang sarat makna. Keberagaman makna pembangunan itu terlihat dari perkembangan pemikiran tentang pembangunan yang terus berevolusi hingga hari ini (pieterse, 2010; Somje, 1991; Todaro & Smith, 2012; Willis, 2005). Hal ini menunjukkan pembangunan tetap diyakini sebagai jalan menuju perubahan dan menjanjikan harapan baru untuk memecahkan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan menjelma menjadi wacana dominan di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk di Indonesia ( Fakih, 2011). Bahkan di negeri ini, hasrat melaksanakan pembangunan dipandang sebagai tindakan ideal untuk mengisi kemerdekaan sejak periode awal pemerintahan Soekarno. Begitu pula halnya di era pemerintahan Soeharto yang sejak awal kekuasaannya merepresentasikan kehendak rakyat sebagai keinginan akan pembangunan (Mas’oed, 2008).

Penempatan pembangunan sebagai hasrat utama terlihat pula pada masa pemerintahan-pemerintahan berikutnya setelah krisis moneter 1998. Indikasinya adalah adanya beragam departemen pemerintah yang melaksanakan program-program pembangunan di seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari perekonomian, kesejahteraan, pertanian, perikanan, kelautan, hingga ke kehutanan, pada level nasional hingga ke tingkat pedesaan.

Secara sederhana, pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya terencana (Kartasasmita, 2001). Proses perubahan ini mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, teknologi dan pendidikan, kelembagaan dan budaya. Pembangunan dapat pula dimaknai sebagai transformasi ekeonomi, sosial dan budaya yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai asfek kehidupan masyarakat. Jika demikian halnya, pembangunan jelas membutuhkan sejumlah prasyarat dalam proses implementasinya. Diantaranya yaitu koordinasi yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan, berorientasi pada keragaman dalam seluruh aspek kehidupan, menuntut adanya mekanisme terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya, mampu berperan secara efisien dan transparan serta membutuhkan adanya partisipasi aktif dan aspirasi agar pembangunan dapat memecahkan masalah yang tengah dihadapi masyarakat. dimensi lainnya yang tidak dapat diabaikan dalam memahami pembangunan adalah menyangkut wilayah atau areal keberlangsungan operasionalnya pada level makro atau bersifat nasional dan mikro di tataran akar rumput oleh suatu komunitas masyarakat.

Menarik dicermati bahwa pemahaman tentang pembangunan sebagai suatu proses dan usaha untuk melakukan perubahan guna meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya, telah menempatkan dan menganggap pembangunan sebagai kata benda yang netral dan disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Bagi penganut pandangan ini, konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain seperti pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme ataupun pembangunan model Indonesia dan seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori sosial ekonomi yang sangat umum dan pandangan ini hampir menjadi pandangan yang menguasai setiap wacana mengenai perubahan sosial.

Sementara itu, dilain pihak terdapat pandangan minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata “pembangunan” itu sendiri adalah sebuah wacana, suatu pendirian atau suatu paham bahkan merupakan idiologi dan teori tertentu tentang perubahan sosial. Menurut pandangan ini, konsep pembangunan bukan merupakan kata yang bersifat netral melainkan aliran dan keyakinan idiologis dan teoritis serta praktik mengenai perubahan sosial.

Singkatnya, pembangunan tidak diartikan sebagai kata benda belaka tetapi sebagai aliran dari suatu teori perubahan sosial. Ini diperlihatkan dengan adanya teori-teori perubahan sosial lainnya yang bersamaan dengan teori pembangunan seperti sosialisme, ketergantungan ataupun teori lainnya. Oleh karena itulah banyak orang yang menamakan teori pembangunan sebagai pembangunanisme. Pengertian pandangan ini menolak teori-teori seperti teori pembangunan berbasis rakyat atau teori *integrated rural development* dan pembangunan berkelanjutan yang dianggap sebagai variasi-variasi lain dari idiologi pembangunanisme.

Perbedaan pandangan tentang pembangunan memberikan pemahaman bahwa makna pembangunan bergantung pada konteks, serta sering digunakan dalam konotasi politik dan idiologi tertentu dan lambat laun, pembangunan sebagai teori berubah menjadi suatu pendekatan dan idiologi, bahkan menjadi suatu paradigma dalam perubahan sosial (Kuhn, 1970).

Salah satu wacana pembangunan sebagai proses upaya perubahan sosial ke arah yang lebih baik adalah kajian tentang pembangunan desa. menguatnya perbincangan kajian dan perhatian tentang pembangunan desa didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan desa dipandang sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses pembangunan daerah dan pembangunan nasional serta sebagai upaya membangun kehidupan masyarakat di wilayah pedesaan yang belum tersentuh oleh program-program pembangunan makro. Oleh karenanya, cakupan pembangunan desa hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat desa baik idiologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan pertahanan keamanan dengan mendasarkan kepada pendekatan bahwa pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat.

Luas Wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.871,98 Ha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 2 Tahun 2012  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 - 2031 yang terdiri dari 26 kecamatan terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Buahdua (6,91%) dari total luasan Kabupaten Sumedang, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua (1,14 %). Rincian luas wilayah Kabupaten Sumedang menurut kecamatan lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel A.  
Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumedang

| **NO.** | **KECAMATAN** | **LUAS WILAYAH (HA)** | **JUMLAH DESA/**  **KELURAHAN** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jatinangor | 3.160,35 | 12 |
| 2. | Cimanggung | 5.555,18 | 11 |
| 3. | Tanjungsari | 4.486,04 | 12 |
| 4. | Sukasari | 4.181,77 | 7 |
| 5. | Pamulihan | 5.069,83 | 11 |
| 6. | Rancakalong | 5.506,87 | 10 |
| 7. | Sumedang Selatan | 9.251,27 | 10/4 \*) |
| 8. | Sumedang Utara | 3.040,17 | 10/3 \*\*) |
| 9. | Ganeas | 2.289,70 | 8 |
| 10. | Situraja | 4.323,37 | 14 |
| 11. | Cisitu | 6.502,82 | 10 |
| 12. | Darmaraja | 4.937,64 | 12 |
| 13. | Cibugel | 5.951,82 | 7 |
| 14. | Wado | 8.426,83 | 10 |
| 15. | Jatinunggal | 7.212,00 | 9 |
| 16. | Jatigede | 10.624,03 | 11 |
| 17. | Tomo | 8.474,29 | 10 |
| 18. | Ujungjaya | 8.622,62 | 9 |
| 19. | Conggeang | 10.697,52 | 12 |
| 20. | Paseh | 3.162,36 | 10 |
| 21. | Cimalaka | 4.328,85 | 14 |
| 22. | Cisarua | 1.770,74 | 7 |
| 23. | Tanjungkerta | 4.372,13 | 12 |
| 24. | Tanjungmedar | 6.067,27 | 9 |
| 25. | Buahdua | 10.768,28 | 14 |
| 26. | Surian | 7.088,23 | 9 |

*Sumber :  RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038*

Selain itu, meski kebijakan dana desa baru berjalan selama enam tahun (2015 – 2021), namun dalam realitasnya telah muncul beberapa persoalan, baik pada aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan aspek sumber daya manusia yang pada gilirannya menimbulkan kesangsian publik terhadap implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Kajian KOMPAK (2017), misalnya, menunjukkan bahwa formula penentuan jumlah dana desa yang akan diterima suatu desa kurang mendukung tujuan Undang-Undang Desa, yaitu pemerataan pembangunan dan akses masyarakat miskin terhadap layanan publik. Formula perhitungan besaran dana desa yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis telah menyebabkan adanya rasa ketidak-adilan dan berkontribusi pada peningkatan ketimpangan mengingat keberagaman desa yang sangat besar antar daerah bahkan di dalam suatu wilayah provinsi. Daerah yang memiliki jumlah desa yang banyak dengan jumlah penduduk miskin yang sedikit, jelas akan mendapatkan dana desa yang jauh lebih besar dari daerah yang memiliki jumlah desa yang sedikit namun penduduk miskinnya banyak.

## Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di muka, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Strategi Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sumedang.

Sedangkan subfokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan;
2. Sumber Daya;
3. Hubungan Antar Organisasi;
4. Karakteristik Pelaksana;
5. Kondisi Sosial, Politik & Ekonomi;
6. Disposisi Implementasi.

## Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam “Strategi Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sumedang” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang ?
2. Strategi apa yang dilakukan para aktor dalam implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang ?

## Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas tadi, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis efektivitas implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang.
2. Menganalisis Strategi yang dilakukan para aktor dalam implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang.

# BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS



## Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu berikut ini berfungsi sebagai *state of art* dan pendukung dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. *State of art* ini merupakan proses menemukan diskontinyuitas, inkonsistensi, pemenuhan kekosongan teori dan tanpa mengabaikan teori-teori sebelumnya. Thomas Kuhn mengatakan bahwa ilmu pengetahuan bersifat revolusioner dari satu paradigma ke paradigma baru dan *state of art*  ini memiliki fokus pada apa yang paling terbaru dari sebuah teori yang ada.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat berbasis keraifan lokal di Kabupaten Sumedang. Untuk menguji orisinalitas penelitian ini maka dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dimaksud. Adapun hasil penelusuran yang dilakukan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Yagus Triana H.S (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.

Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan potensi terbesar di sektor pariwisata, sehingga menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang menghasilkan pendapatan daerah terbesar, di Kabupaten Pangandaran sampai saat ini terdapat beberapa obyek wisata yang telah menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran telah menfokuskan perhatiannya untuk mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor utama dalam pembangunan daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renja tahunan Kabupaten Pangandaran, bidang pariwisata menjadi salah satu prioritas pengembangan daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Landasan teoritisnya penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar pada fenomenologi dan menggali makna dalam penelitian.

1. **Ilham Arief Sirajuddin (2014)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 di Kota Makassar tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, untuk menganalisis kualitas implementasi pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar, untuk mengkaji kepuasan masyarakat pengguna pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar, serta untuk mengetahui pengaruh kualitas implementasi pelayanan publik dasar bidang sosial secara parsial dan bersama-sama terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna di Kota Makassar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dipilih tipe penelitian gabungan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan pengimplementasian Perda No. 8 Tahun 2009 di Kota Makassar melalui pendekatan sumber (*Institusional Research*). Sementara itu metode kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan kualitas dan kepuasan masyarakat serta pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pengguna pelayanan publik dasar bidang sosial dalam wilayah Kota Makassar melalui pendekatan khalayak (*Audience Research*).

1. **Rarung, Pioh, Waworundeng (2018)**

Penelitian berjudul Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) publish pada jurnal Eksekutif. Pemerintah Indonesia saat ini sangat berupaya dalam meningkatkan pembangunan nasional, daerah, kota, dan desa guna tercapainya keseimbangan dan pemerataan dalam pembangunan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan Alokasi Dana Desa adalah kebijakan pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten /Kota.Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evalauasi kebijakan dari William Dunn dalam Riant Nugroho (2014:713) dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, reponsivitas, dan ketepatan. Fokus penelitian yakni Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan alokasi dana desa yang ada di Kabupaten Minahasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pengawasan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

## Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan pemikiran atau argumen dari peneliti dalam menyajikan penelitian yang akhirnya melahirkan asumsi-asumsi atau proposisi dan teori yang relevan dengan masalah penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang diteliti.

Implementasi kebijakan adalah sebagai suatu proses atau langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan oleh karena itu banyak model implementasi yang dikembangakan oleh para ahli untuk dapat agar sebuah kebijakan itu dapat terwujud sesuai dengan rencana dari kebijakan yang dibuat sebelumnya. Seperti yang dikemukakan bahwa implementasi kebijakan ini mengandung makna suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran yang akan dicapai adalah merupakan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah atau eksekutif. Kekurangan atau kesalahan suatu kebijakan biasanya akan diketahui setelah kebijakan itu dilaksnakan, begitu juga suksesnya pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelakasanaan suatu kebijakan. Kebijakan sebagai alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu, merupakan bagian dari upaya manusia untuk mengetahui sesuatu, untuk mengatasi masalah atau untuk mencapai sejumlah tujuan.

Berkaitan dengan kebijakan yang dibahas di atas, maka pengertian kebijakan sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun perilaku negara pada umumnya. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor yang meliputi komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi, Edward III (1980 :9) menyatakan bahwa :

*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation? In the next four chapters we shall attempt to answer these important questions by considering four critical factors or variables in implementing public policy : communicaton, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic policy.*

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan dalam melaksanakan kebijakan dilihat dari empat faktor yakni : komunikasi, sumberdaya, sikap atau disposisi pelaksana dan birokrasinya. Kegiatan yang dilakukan mencakup usaha-usaha yang mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-uasaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

## Proposisi Penelitian

Berangkat dari landasan teoritik dan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengajukan proposisi penelitian sebagai berikut :

1. Efektifitas Implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang ditetukan *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of policy* (Konteks kebijakan).
2. Terdapat alternatif strategi yang dapat mengefektifkan implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang.

# BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN



## Objek Penelitian

Secara garis besar penelitian ini terfokus kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang pada umumnya dan Desa pada khususnya sebagai organisasi pelaksana dari implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan ketentuan bahwa Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa, maka objek penelitian ini adalah desa, dalam hal ini desa-desa di Kabupaten Sumedang.

Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan dan 270 desa. Penelitian ini mengambil 9 (sembilan) desa di 3 (tiga) kecamatan sebagai objek teliti. Pemilihan kesembilan desa tersebut didasarkan pada perbedaan status desa serta besaran Dana Desa yang diterima sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5  
ObjekPenelitian

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Desa** | **Status Desa** | **Jumlah Dana Desa yang Diterima (Rp)** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Jatinangor | 1. Cibeusi | Mandiri | 690.054.000 | 781.557.000 | 828.162.000 |
| 1. Cipacing | Mandiri | 728.207.000 | 837.352.000 | 970.333.000 |
| 1. Cileles | Mandiri | 751.916.000 | 872.333.000 | 913.923.000 |
| 2 | Tanjungsari | 1. Jatisari | Maju | 661.549.000 | 737.890.000 | 786.015.000 |
| 1. Kutamandiri | Berkembang | 726.101.000 | 835.483.000 | 883.829.000 |
| 1. Gudang | Maju | 715.210.000 | 818.986.000 | 862.107.000 |
| 3 | Pamulihan | 1. Citali | Maju | 743.790.000 | 860.731.000 | 834.203.000 |
| 1. Ciptasari | Berkembang | 799.829.000 | 767.589.000 | 848.595.000 |
| 1. Cilembu | Berkembang | 734.295.000 | 847.107.000 | 908.172.000 |

Sumber: Data penelitian (2021)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa status desa-desa di Kabupaten Sumedang, khususnya untuk 9 (sembilan) desa yang menjadi objek penelitian, masuk dalam kategori desa maju dan berkembang. Selain itu, terlihat pula bahwa besaran Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa tidaklah sama pada setiap tahunnya. termasuk Desa Citali jumlah Dana Desa yang diterima mengalami penurunan pada tahun 2020.

### Gambaran Umum Kabupaten Sumedang

Pemerintahan Kabupaten Sumedang terdiri dari 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa. Jumlah penduduknya mencapai 1.135.818 jiwa dengan luas wilayah 1.518,33 km² dan sebaran penduduk 748 jiwa/km².

Sumedang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumedang yaitu 153.124 ha terletak antara 6˚44’-70˚83’ Lintang Selatan dan 107˚21’-108˚21’ Bujur Timur. Topografi yang dimiliki Kabupaten Sumedang sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan gunung dengan ketinggian tempat antara 25-1.667 m diatas permukaan laut.

### Susunan Organisasi Kelurahan di Kabupaten Sumedang

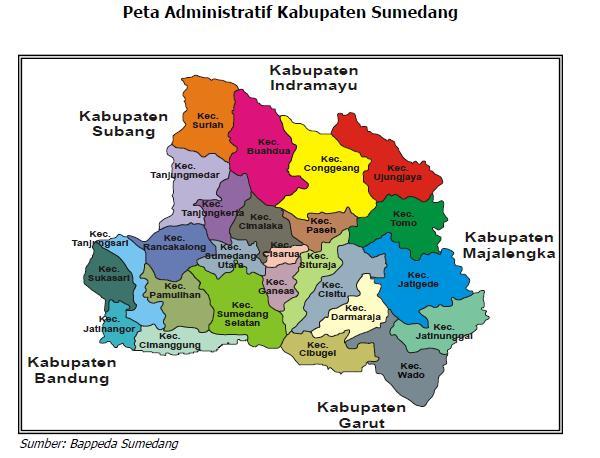
Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan di Kabupaten Sumedang terdiri dari :

1. Lurah ;
2. Sekretariat Kelurahan;
3. Seksi , terdiri dari :
4. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Sosial.

### c. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015tentang Organisasi Pemerintah Desa.

1. Kepala Desa, membawahkan;
2. Perangkat Desa terdiri dari :
3. Sekretariat Desa;
4. Pelaksana Teknis;
5. Pelaksana Kewilayahan.



Sumber: Bapeda Kabupaten Sumedang

Gambar 6   
Peta Administrasi Kabupaten Sumedang

## Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan langkah kerja yang digunakan dalam kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pengumpumpulan data, pengolahan data, sampai pada tahap pengambilan keputusan (Sutedi, 2009: 22).pada bagian ini akan dijelaskan desain penelitian, operasional parameter, sumber data, populasi dan informan penelitian, instrumen penelitian dan teknik analisa data.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengedepankan penelitian pada kondisi objek yang alamiah atau naturalistik, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sifat dari metode kualitatif tersebut didasarkan pada pendapat Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2014:9) tentang beberapa ciri metode kualitatif, yaitu:

1. *Qualitative research has natural setting as the direct source of data and researcher is the key instrument.*
2. *Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form of words of pictures rather than number.*
3. *Qualitative research are concerned with process rather than simply with outcomes or products.*
4. *Qualitative research tend to analyze their data inductively.*
5. *“Meaning” is of essential to the qualitative approach.*

Ciri lain dari penelitian kualitatif dikemukakan oleh Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2014:10) yang mengutip Erickson, yaitu:

1. *Intensive, long term participation in field setting.*
2. *Careful recording of what happens in the setting by writtig field notes and interview notes by collecting other kinds of documentary evidence.*
3. *Analytic reflection on the documentary records obtained in the field.*
4. *Reporting the result by means of detailed descriptions, direct quotes from interview, and interpretative commentary.*

**2. Analisis SWOT**

Penelitian ini melibatkan analisis SWOT sebagai alat guna mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dalam implementasi kebijakan Dana Desa. Melalui analisis SWOT diharapkan dapat dirumuskan suatu strategi sehingga implementasi kebijakan Dana Desa dapat berjalan secara efektif.

Mengacu pada pendapat Rangkuti (2017:23), penyusunan strategi melalui analisis SWOT mencakup tahap pengumpulan data dan analisis sebagai berikut.

1. Tahap pengumpulan data

Tahap ini merupakan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data yang berupa data eksternal (yang diperoleh dari lingkungan di luar organisasi) dan data internal (yang diperoleh dari dalam perusahaan).

1. Matriks faktor strategi eksternal

Untuk membuat matriks faktor strategi eksternal, sebelumnya ditentukan Faktor Strategi Eksternal (EFAS) dengan cara:

1. Menyusun 5 - 10 peluang dan ancaman pada kolom 1;
2. Memberi bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting) pada kolom 2;
3. Menghitung rating masing-masing faktor dengan memberikan skala 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) pada kolom 3;
4. Mengalikan bobot dalam kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk memperoleh faktor pembobotan;
5. Menjumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor pembobotan.

## Pembahasan

### Efektivitas Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Sumedang

Pada bagian ini akan diuraikan hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh dari lapangan baik secara langsung melalui wawancara mendalam, maupun secara tidak langsung melalui observasi dan kajian data sekunder terkait dengan implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang.

Keberhasilan implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang dianalisa oleh peneliti dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan *Implementation as a Political and Administrative Process*. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dua dimensi penelitian dari model implementasi Merilee S. Grindle sebagai berikut :

1. **Isi Kebijakan *(Content of Policy)*.** Terdiri 6 (enam) indikator, yakni:
2. **Kepentingan yang Mempengaruhi**

Kepentingan yang mempengaruhi menurut Grindle dalam Agustino (2016:142) menyatakan bahwa “berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan- kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”.

Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan distribusi kebijakan Dana desa yaitu pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal yang dilaksanakan oleh petugas DPMD Kabupaten Sumedang. Adapun mekanisme yang harus dilakukan berdasarkan Perturan Menteri Keuangan (PMK) No 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020.

Wawancara peneliti dengan informan yakni Sekretaris Camat Kecamatan Jatinangor, dikutip sebagai berikut:

“Kepentingan kami selaku pelaksana kebijakan sangat terarah dan sesuai dengan PP 8/2016 yang mengartikan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanannya kami menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, tidak ada kepentingan lain yang diluar hal tersebut”

Masing-masing unsur baik itu perumus kebijakan, pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran dalam kebijakan dana desa memiliki kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut. Sebagai perumus kebijakan, kebijakan dana desa melaksanakan perencanaan, pemetaan dan evaluasi, pelaksana kebijakan melakukan pendistribusian sedangkan kelompok sasaran dalam hal ini adalah masyarakat memanfaatkan kebijakan ini sebagai peluang untuk memberdayakan perekonomian keluarga.

# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN



## Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan Penelitian maka dapat dipaparkan kesimpulan sebagai berikut:

* + - * 1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Kebiajkan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang belum berjalan efekif. Hal tersebut dikarenakan unsur isi kebijakan dan lingkungan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan Dana Desa di Kabupaten Sumedang. Unsur yang paling menghambat dalam pengimplementasian kebijakan Dana Desa di dalam pemberdayaan mesyarakat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang adalah faktor lingkungan, pengawasan dan kelembagaan dana desa baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa.
        2. Untuk mengatasi hambatan dan memaksimalkan efektifitas kebijakan dana desa dalam pemberdayaan mesyarakat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang, ditemukan strategi diversivikasi, yang merekomendasikan strategi memaksimalkan potensi dan meminimalisir ancaman yang cukup tinggi. Dengan penerapan strategi diversifikasi, diyakini implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan mesyarakat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang akan efektif.

## Saran

### Saran Akademis

Saran akademis yang dapat disampaikan peneliti pada penelitian ini terdiri dari:

* + - * 1. Disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan fenomena implementasi kebijakan serta korelasi dalam persfektif Ilmu Administrasi Publik dan Kebijakan Publik
        2. Teori yang digunakan pada penelitian ini masih relevan dan aktual sehingga peneliti dapat memperkuat teori yang ada. Disarankan kepada peneliti yang akan datang untuk mengembangkan teori ini dengan konteks dan lokus berbeda, sehingga dapat menghasilkan pengembangan teori yang lebih baik
        3. Disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan dalam konteks implementasi kebijakan publik, sehingga dapat digali lebih dalam lagi konsep konsep terkait dengan implementasi kebijakan publik.

### Saran Praktis

Secara praktis peneliti dapat memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa secara internal harus senantiasa berbenah terutama terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program Dana Desa.

Langkah langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang adalah dengan cara:

* + - 1. Membentuk bidang khusus penyelenggara Dana Desa
      2. Menyiapkan perangkat aturan yang baku sebagai landasan penyelenggaraan dan pengawasan dana desa.

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Sumedang untuk mensinergikan kerjasama antar perangkat untuk penyelenggaraan program dana desa, agar pelaksanaannya dapat terarah dan terencana dengan baik, serta mengutamakan pemberdayaan masyarakat desa dengan berbasis kearifan lokal.

**ABSTRAK**

Penelitian ini didasari oleh masalah yang dirasakan dalam keberlanjutan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan anggaran dana desa, yang dianggap seringkali memarginalkan peran dan keterlibatan masyarakat desa serta kurang melibatkan kearifan lokal yang kental dalam masyarakat pedesaan, sehingga mengesankan program anggaran desa hanya sebagai rutinitas dan formaslitas yang manfaatnya kurang efektif dirasakan oleh masyarakat desa sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal, serta menemukan strategi yang dilakukan para aktor dalam implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa berbasis kearifan lokal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan *mix methode* dengan strategi strategi *embeded konkuren*. Sedangkan untuk perumusan strategi kebijakan, peneliti menggunakan alat bantu analisis SWOT (*Stregth, Weakness, Opportunity, Treath*). Penelitian dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan sembilan desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang. Analsiis masalah tersebut akan dikaji dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (1980).

Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan mesyarakat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang belum berjalan efekif. Hal tersebut dikarenakan unsur isi kebijakan dan lingkungan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan Dana Desa di Kabupaten Sumedang. Unsur yang paling menghambat dalam pengimplementasian kebijakan Dana Desa di dalam pemberdayaan mesyarakat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang adalah faktor lingkungan, pengawasan dan kelembagaan dana desa baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa.. Strategi yang ideal untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan strategi Diversifikasi, yakni dengan memaksimalkan potensi kekuatan untuk mengatasi atau meminimalkan ancaman dalam kebijakan Dana Desa di Kabupaten Sumedang dalam memberdayakan masyarakat berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumedang.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pemberdayaan Masyarakat**

# ABSTRSCT

*This research is based on the perceived problems in the sustainability of village development carried out by the village government by utilizing the village fund budget, which is considered to often marginalize the role and involvement of the village community and does not involve local wisdom that is thick in rural communities, thus impressing the village budget program as just a routine. and formalities whose benefits are less effective for the villagers themselves. The purpose of this study is to describe how the implementation of village fund policies in community empowerment based on local wisdom, as well as to find strategies carried out by actors in implementing village fund policies in empowering village communities based on local wisdom.*

*The method used in this study is a descriptive research method with a mix method approach with concurrent embedded strategies. Meanwhile, for the formulation of policy strategies, researchers use a SWOT analysis tool (Stregth, Weakness, Opportunity, Treath). The research was conducted at the Village Community Empowerment Service (DPMD) and nine villages located in the Sumedang Regency area. The analysis of these problems will be studied using the theory of policy implementation proposed by Grindle (1980).*

*The results of the study indicate that the implementation of the Village Fund Policy in community empowerment based on local wisdom in Sumedang Regency has not been effective. This is because the elements of the policy content and the policy environment have not fully supported the implementation of the Village Fund in Sumedang Regency. The most hindering elements in implementing the Village Fund policy in community empowerment based on local wisdom in Sumedang Regency are environmental factors, supervision and village fund institutions both at the district and village government levels. The ideal strategy to overcome this problem is the Diversification strategy, namely by maximizing potential strengths to overcome or minimize threats in the Village Fund policy in Sumedang Regency in empowering local wisdom-based communities in Sumedang Regency.*

***Keywords: Public Policy Implementation, Community Empowerm***

# DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara

Abidin, Said Zainal (2012). Kebijakan Publik. Jakarta. Salemba Humanika.

Adimihardja dan Harry.2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit: Humaniora Utama Press Bandung:

Adisasmita, Rahardjo, (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan , Jakarta: Graha Ilmu.

Agus Wibowo, Gunawan, (2015). Penerbit: PT Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.

Agustino Leo, (2008). Dasar –Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.

Ahmadi, A. (2001). Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Alfian, Magdalia. (2013). “Potensi Kearifan lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa”. Prosiding The 5 thn ICSSIS; “Ethnicity and Globalization”, di Jogyakarta pada tanggal 13-14 Juni 2013.

Anderson, James. E. (1979). *Public Policy Making, Second Edition*. New York Holt, Rinehart and Winston.

Anderson, J, (1978 : 3). *Public Policy-Making,* Second edition, Holt, Rinehart and

Antlov, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia : The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 39 (2),193-214. <https://doi.org/10.1080/00074910302013>

Arndt, H. W., & Hill, H. (2003). The Indonesia Economy: Structural Adjustment after the Oil Boom. *Southeast Asian Affairs*, n.a (n.a), 106-119.

A, Suhaenah. Suparno (2001). Membangun Kompetensi Dasar. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Bartle, R. G dan Donald R. Sherbert (2002). *Introduction to Real Analysis.*3 USA: John Wiley and Sons

Beratha, I Nyoman (1992). Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta Ghalia. Indonesia . 6 pages

Budi Winarno (2008). Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta. Fauzi Luthan.

Brown, Donald (1995). *Proverty Groweth Dichotomy*. Dalam Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds), People : *From Impoverisment to Empowerment*. New York : New York University Press.1995.

Chambers, Robert (1995). Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

David Osborne and Peter Plastrik (1992). “*Banishing Bureaucracy* : *The Five Strategic for Reinventing Government*”. David Osborne and Ted Gaebler. “*Reinventing Government*” : *How the Entrepreneural Spirit is Transforming the Public Sector*”

Deddiy Mulyadi, (2015). **Studi** Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta.

Dye, Thomas R. (1992). *Understanding Public Policy* (Six Edition). London :Englewood Cliff, Prentice Hall.

Dirkse, Husken, & Ruten (1993). *Development* ***and social welfare*: *Indonesia's experiences under the new order*. Publisher: KITLV PRESS,**

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC :

Congressional Quarterly Press

Eko, Sutoro (2002). Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bandung: Alfabeta

Fajarini, Ulfah. (2014). Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. Jurnal Sosio Didaktika,1 (2), 123—130

Fakih M, (2011). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist

Press, Yogyakarta.

Ferlie, P. &. C. Pettigrew, L. Ashburner and L. Fitzgerald. (1996).*The New Public Management in Action*. Oxford : Oxford University Press

Frank J Goodnow dan Leonard D. White. (1900). *Politics and Administration*

Frederick Winslow Taylor (1986). “*Principles of Scientific Management*” Jakarta : Bringin Mulya

Giyarsih, S. R., & Marfai, M. A. (2017). The perception of stakeholders on regional transformation on the outskirts of Yogyakarta City, Indonesia. GeoJournal. <https://doi.org/10>. 1007/s10708-017-9812-9

Grindle, Merilee S (ed). (1980). *Politic and Apolicy Implementation in Third World*. New Jersey : Princetown University Press.

Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Jakarta, ERLANGGA,1983.

Howlett, Michael & M Ramesh (1995). *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford University Press.

Islamy, M. Irfan. (2004). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta

Istiawati, F. N. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal Adat Ammatoa dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi. Cendekia, 10(1), 1-18.

Jones, Charles O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Juanwen, Y., Quanxin, W,. & Jinlong, L. (2012). Forest Policy and Economics Understanding indigenous knowledge in sustainable management of natural resources in China Taking two villages from Guinzhou Province as a case. *Forest Policy and Economics,* 22 (09), 47-52. <https://do.org/10.1016/j>. Forpol.2012.02.012

Kartasasmita, Ginanjar (2001). Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta PT. Pustaka Cidesindo.

Kieffer C.H. , (1984), *Citizent Empowerment* : A Developmental Perspektive. Dalam Prevention In Human Serveces Vol. 3 hal.

Kolawole, O. D. (2015). Development in Practice Twenty reasons why local knowledge will remain relevant to development. *Development in Practice*, 25(8), 1189-1195. https://doi.org/10.1080/09614524.2015.1078777

Liddle, R. W. (1985). Soeharto’s Indonesia: Personal Rule and Political Institutions. *Pacific Affairs*, 58 (1), 68-90. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2758010>.

Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung, Indonesia : Alfabeta.

Michiani, M. V., & Asano, J. (2016). Influence of inhabitant background on the physical changes of Banjarese house: A case study in Kuin Utara settlement, Banjarmasin, Indonesia. *Frontiers of Architectural Research*, 5(4), 412- 424. <https://doi.org/10.1016/j>. Foar.2016.09.005

Mubyarto, M. (1994). Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal. Jogjakarta, Indonesia: Aditya Media & P3PK UGM.

Nurhayati, A., Lili, W., Herawati, T., & Riyantini, I. (2016). Derivatif Analysis of Economic and Social Aspect of Added Value Minapdi (Paddy-Fish Integrtive Farming) a Case Study in the Village of Sagaracipta Ciparay Sub District, Bandung, West Java Province, Indonesia. *Aquatic Procedia*, 7,12-18. http:do.org/10.1016/j.aqpro.2016.07.002

Oakley, Peter. and David Marsden. (1984). *Approaches to Participation in Rural Development.* Geneva: ILO.

Pauker, G.J. (1968). Political consequences od rural development programs in Indonesia. *Pacific Affairs*, 41(3),386-402.

Pearson Prentice Hall. Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). Strategi Promosi yang kreatif. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Utama.

Prijono, Onny. Pranarka (1996). Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan. Implementasi. Jakarta: Centre For Strategic And International Studies.

Putra, Fadillah. (2003). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Pressman, Jeffrey, L. Wildavsky, Aaron, B, (1973). *Implementation*. Barkely California : University of California Press.

Raharjo Adisasmita (2006). Menbangun Desa Partisipatif, Yogyakata : Graha Ilmu.

Ratna., Murtiani, A., & Fauzan, W. (2011). Penerapan pendekatan contextual teaching and learning (CTL) berbasis lesson study dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fisika di SMP Negeri kota Padang. Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika. 1. 1-21.

Roth, D. (2014). Environmental sustainability and legal plurality in irrigation: the Balinese subak*. Current Opinion in Environmental Sustainability*, 11, 1-9. <http://doi.org/10.1016/j.cosust.2014.09.011>

Saefullah A. (2007). Manajemen Perubahan, Bandung: Pustaka Setia.

Shafritz, Jay.M. dan E.W.Russell (1997). *Introducing Public Administration*. New

York, N.Y.:Longman Penerbit Binarupa Aksara Jakarta.

Suandi, I Wayan. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.

Subarsono, AG. (2004). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).

----------------(2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Sulistiyani (2004).  Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Jakarta: Gava Media.

Suradinata, Ermaya. (1998). Teori dan Analisis Kebijaksanaan Publik. Bandung : Ramadhan.

Suradi, S. (2005). Perancangan dan Implementasi Modul Kontrol. Bandung, Indonesia : Alfabeta.

Suryadinata, L. (1998). Indonesia’s *Political System: Continuity and Change*, *Contemporary Southeast Asia*, 9(4), 268-281.

Sutrisno, (2005), Strategi Pemberdayaan Masyarakat*,Yogyakarta*: Andi Offset.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Tallei, T. E., & Sumarto, S. (2012). Local Wisdom of Donowudu Community in Preserving Forest as a Water Source for the City of Bitung Customary rule Water source. In W. L. Filho (Ed.), *Climate Change and the Suistainable Use of Water Resources* (pp. 773-778). Berlin, Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-22266-5>

Tampubolon . (2006). Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. (2001). Birokrasi Dalam Polemik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.

--------------, Bintoro. (1997). Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung

Tjokroamidjojo. (1996). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : LP3ES Bratakusumah.

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C.( 2012). “*Pembangunan Ekonomi”.*Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

Udoji, Chief J.O, (2001). *The African Public Servant As Public Policy in Africa,*

Addis Abeba: African Association For Public Administration and

Management.

Uzair, M. (1970). Economic Development of Indonesia. *Pakistan Horizon*, 23(2), 123-137.

Van Metter, Donalds & Carl E Van Horn.(1975). *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework Administration Society*. Vol.6 No. 4 February.

Mazmanian and Sabatier*, (*1983)*: Implementation and Public Policy* *Glenview, III:* Scott, Foresman*.*

Mas'oed, Mohtar, (2008) “Politik, Birokrasi dan Pembangunan” PUSTAKA PELAJAR , 2008.

Mardikanto T dan Soebiato P, (2014), Pemberdayaan Masyarakat. Bandung, Alfabeta.

Murray G.Ross. (1987), dalam Tampubolon. Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota Surabaya: Usaha. Nasional.

Mustopadidjaja. (1998). Kebijakan Administrasi Negara, Jakarta : LAN RI.

Nicholas Henry. (1926). Penerbit : Rajawali Pers Cetakan tahun 1995

Nugroho Dwijowijoto, Riant. (2004). Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta : PT. Elek Media Komputindo.

**----------.** (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi,. Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Kartasasmita, Ginanjar, (1996). Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: Pustaka Cidesindo.

-----------, 2001. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

Kuhn (1970). Paradigma Hukum Perspektif Filasafat Ilmu Renere Descartes, Auguste Comte, Thomas S Kuhn [Home](http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/index) /[Archives](http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/issue/archive) /[Vol 1 No 01 (2016): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan](http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/issue/view/191) /Articles  <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1713>.

Wahab, Solichin Abdul, Dkk. (2002). Masa Depan Otonomi Daerah. Malang: Percetakan SIC.

-----------. (2004). Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. And Human Behaviour : Learning from History and Local Wisdom. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 42, 6-11. [http://doi.org/10.1016/j. Sbspro.2012.04.161](http://doi.org/10.1016/j.%20Sbspro.2012.04.161)

Widodo, J. (2012). Urban Environment and Human Behavior : Learning from History and Local Wisdom. *Procedia – Social and Beahvioral Sciences*, 42, 6-11. <https://doi.org/10.1016/j.2012.04.161>

Wiwanitkit, V. (2011). Thai ethnopharmacological herbs for diabetes treatment: Data collection and informatics tracing for therapeutic property. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 5 (2), 103-104. <http://doi.org/10.1016/j.dsx.2012.02.005>

Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita

Weatherbee, D. E. (1985). Indonesia: The Pancasila State. *Southeast Asian Affair*, 133-151.

White (1926). *Introduction to the Study of Public Administration*. Penerbit New York : Macmillan

Winarno, Budi, (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo

Uzair, M. (1970). Economic Development of Indonesia. *Pakistan Horizon*, 23(2), 123-137.

**Dokumen Lain :**

1. **Peraturan dan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun1965 tentang Desa Praja (Pemerintahan Desa)

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Permendagri RI Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun

Permendesa Nomor 4 Tahun 2017) tentang Prioritas penggunaan dana desa

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No.3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 dengan harapan dapat menjadi dasar untuk implementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 2 Tahun 2012  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031.

1. **Buku Penunjang**

Abdul Wahab, Solichin, (2002). Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Sinar Grafika.

Anggara, Sahya, (2014). Kebijakan Publik, Bandung. CV Pustaka Setia.

Bambang Trisantono. S, (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung : Fokus Media

Erwan Agus P, Dyah Ratih. S, (2015). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media

Hanif Nurcholis, (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga

Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta Selatan. Salemba Humanika

Mark Turner & David Hulme, (1997). *Governance, Administration &Delopment*. London : Kumarian Press

Miftah Thoha, (2012). Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan. Yogyakarta : Kencana Prenada Media Group

Mulyana, Deddy. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

1. **Artikel/Majalah Ilmiah/Jurnal**

Gichoya (2014). *Factor Affecting the Succesful Policy Implementation of ICT Projects in Government . Research School of Informatics*

Ilham Arief Sirajuddin (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar. Makasar. UNM. Milwan (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Serang Provinsi Banten. Jatinangor. IPDN.

Milwan (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Serang Provinsi Banten. Jatinangor. IPDN.

Muh. Tang Abdullah (2016). Inovasi Pemerintahan Daerah (Studi Inovasi Penyelenggaraan Urursan Pendidikan Di Kabupaten Gowa. Malang. UNBRAW.

Tati Juwita (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

Taufiqurakhman (2015). Implemtasi Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Bandung. UNPAD

Yagus Triana H.S. (2018). Strategi Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Pangandaran Profinsi Jawa Barat. UNPAS BANDUNG.

**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT   
BERBASIS KEARIFAN LOKAL  
DI KABUPATEN SUMEDANG**

**Study Kasus Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2020**

***POLICY IMPLEMENTATION STRATEGY OF VILLAGE FUND***

***IN COMMUNITY EMPOWERMENT***

***BASED ON LOCAL WISDOM***

***IN SUMEDANG DISTRICT***

**(*Case Study of Sumedang Regent Regulation Number 37 of 2020*)**

**ARTIKEL DISERTASI**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Syarat Guna Mengikuti   
Seminar Hasil Penelitian Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial**

**Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik**

**Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Oleh :**

**DADANG SUPRIATNA**

**NPM : 189020034**



**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL**

**BIDANG KAJIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**